**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².[[1]](#footnote-2) Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Tiongkok (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.[[2]](#footnote-3)

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan. Laut Cina Selatan terletak disebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina;di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia ; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam.[[3]](#footnote-4)

Penemuan minyak dan gas bumi pertama kali di pulau Spartly adalah pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People’s Republic of China* (RRC) memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spartly adalah sekitar 17,7 miliar ton (1,60 x 1010 kg). Fakta tersebut menempatkan kepulauan Spartly sebagai tempat cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya,serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.[[4]](#footnote-5)

Sumber daya hidrokarbon juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan ini merupakan gas alam. Sementara itu, penggunaan sumber daya gas alam diproyeksikan bertambah sebanyak 5% per tahun untuk dua dekade yang akan datang. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 20 *trilion cubic feet* (Tcf) per tahun, lebih cepat daripada bahan bakar lainnya.[[5]](#footnote-6)

Laut Cina Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting. Jalur pelayaran ini seringkali disebut *maritime superhighway* karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas *supertanker* dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah *supertanker* yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagian barat daya Laut Cina Selatan bahkan lebih dari tiga kali yang melewati Terusan Suez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama.[[6]](#footnote-7)

Selama dua puluh tahun ke depan konsumsi minyak bumi di negara-negara Asia akan naik 4% rata-rata per tahun. Apabila laju pertumbuhan tetap konsisten, permintaan minyak bumi akan naik menjadi 25 juta barrel per hari. Mau tidak mau untuk mengatasi permintaan Asia dan Jepang harus dilakukan impor minyak dari Timur Tengah. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia tersebut setelah melewati Selat Malaka harus melalui Laut Cina Selatan. Pelayaran Komersial di Laut Cina Selatan didominasi oleh bahan mentah yang menuju negara-negara Asia Timur, dan yang melewati Selat Malaka dan Kepulauan Spartly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG), sementara kargo kering kebanyakan batu bara dan bijih besi. Pengangkutan LNG melewati Laut Cina Selatan mewakili dua per tiga dari perdagangan LNG seluruh dunia menuju Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.[[7]](#footnote-8)

Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan (*South China Sea*, atau SCS) ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Spartly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992[[8]](#footnote-9). Sedangkan definisi sengketa teritorial menurut Mahkamah Internasional, adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.[[9]](#footnote-10) Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.[[10]](#footnote-11)

Sengketa terirorial ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spartly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut[[11]](#footnote-12). Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN *(Association of Southeast Asian Nations)*. Adapun negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.[[12]](#footnote-13)

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan dan karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spartly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas kepulauan di Laut Cina Selatan pada tahun 1974, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menganggap Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menginvasi kepulauan Paracel ini juga di klaim oleh Vietnam. Pada Tahun 1979, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988, kedua angkatan laut bentrok di *Jhonson Reef* di kepulauan Spartly yang menelan korban dimana dengan tenggelamnya beberapa kapal Vietnam dan 70 orang prajurit Angkatan Laut Vietnam gugur.[[13]](#footnote-14) Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam mengganggap kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya.[[14]](#footnote-15)Adanya konfrontasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT)-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan Internasional tahun 1994. Pada tahun 1995 Taiwan menembak arteleri ke kapal Angkatan Laut Vietnam.[[15]](#footnote-16) Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Filipina. Pada tahun 1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina menembaki nelayan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tahun 2001 tentara Vietnam menembakkan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Spartly.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya, dan bahkan, konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan telah terjadi berulang sejak dasawarsa 1970, selain telah berlangsung di masa lalu dalam sejarahnya, hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol atau penguasa di wilayah itu, yang berdampak pada perubahan nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan terparah tercatat pada tahun 1974.[[16]](#footnote-17) Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak tahun 1974 hingga sekarang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Cina Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.[[17]](#footnote-18)

Dalam konflik Laut Cina Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan hingga kini,[[18]](#footnote-19) peran ASEAN dan Tiongkok pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 19 Juli 2011 telah menyepakati kerangka acuan penyusunan *code of conduct* di Laut Cina Selatan. Kerangka acuan itu penting agar ASEAN dan Tiongkok bisa mencapai kesepakatan tentang *code of conduct* sebagai turunan dari *Declaration of Conduct(DOC) of Parties on the South China Sea.* Penting untuk dipahami bahwa kesepakatan tentang kerangka acuan tidak mudah karena sikap Tiongkok yang selama ini cenderung tidak akomodatif terhadap usulan-usulan dari negara-negara lain guna menyelesaikan sengketa itu secara damai.

Meskipun kesepakatan tentang kerangka acuan merupakan kemajuan dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan, akan tetapi perlu dipahami bahwa kerangka acuan tersebut tidak bersifat mengikat. Kondisi demikian memberikan peluang kepada negara yang merasa kepentingannya kurang terakomodasi dalam penyusunan *code of conduct* nantinya untuk menarik diri secara *unilateral*. Artinya, masih terbuka kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam penyusunan *code of conduct* nantinya.[[19]](#footnote-20) Terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan Tiongkok. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli Tiongkok dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya Tiongkok juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina.[[20]](#footnote-21)

Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan Tiongkok. Sayang sekali beberapa perilaku Tiongkok seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tidak bermanfaat.[[21]](#footnote-22) Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat ekplorasi minyak Vietnam yang dilakukan Tiongkok juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut Cina Selatan. [[22]](#footnote-23)

Selanjutnya Pemerintah RRT mengeluarkan pernyataan keras kepada negara-negara pengklaim kedaulatan atas Laut China Selatan untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan mineral di kawasan perairan tersebut. Sebaliknya, Filipina menuduh Angkatan Laut RRT tengah membangun kekuatan militer di Spratly. [[23]](#footnote-24)

Letak geografis kepulauan natuna yang berbatasan langsung dengan laut china selatan memang memberikan rasa kekwatiran bagi pemerintah indonesia dan rakyat indonesia.[[24]](#footnote-25) Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mendirikan pusat-pusat pertahanan di perbatasan kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo merencanakan membangun Indonesia sebagai pusat maritim dunia. sedangkan menurut Siagian yang memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building)*”.[[25]](#footnote-26) Seperti yang dikatakan Siagian maka Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan negara untuk meningkatkan kekuatan dan pertahanan Indonesia untuk kestabilan negara. Luas kepulauan natuna yang kurang lebih sebesar 2.631km2 dimana letak yang sangat strategis bagi jalur pelayaran perdagangan internasional dan menyimpan berjuta kekayaan alam,[[26]](#footnote-27) Diprediksi kepulauan natuna memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang besar,dengan melihat potensi ini pemerintah wajib mempertahankan kepulauan natuna dari gangguan apapun termasuk rembesan konflik Laut Cina Selatan. Tiongkok menegaskan tidak ada masalah dengan indonesia. Memang Indonesia tidak terlibat langsung di konflik Laut Cina Selatan,tapi dampak rembesan konflik perlu diperhitungkan. Beberapa waktu lalu presiden Joko widodo memberikan pernyataan mengenai konflik ini waktu beliau berkunjung jepang, yaitu “ Indonesia bisa Menjadi Penghubung Dalam Sengketa Laut China Selatan”. Dalam kunjungan pembicaraan dengan Presiden Xi, Presiden Jokowi berencana menawarkan diri untuk membantu penyelesaian sengketa perbatasan Laut Cina Selatan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi *“honest broker”* antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa.[[27]](#footnote-28)

Kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim sesungguhnya diawali oleh presiden Indonesia yang ke enam bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijakan *Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan MP3EI untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Salah satu strategi kebijakan MP3EI ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan *SLoC* dan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.[[28]](#footnote-29)

Setelah masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir dua periode, program MP3EI nya dirubah oleh Presiden Joko Widodo menjadi TRISAKTI NAWACITA yang di dalamnya terdapat sektor prioritas yaitu Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.[[29]](#footnote-30) Bukan hanya mengedepankan sektor maritim saja, tetapi Presiden Joko Widodo pula mengadopsi kebijakan SBY yaitu menjadikan pembangunan infratsruktur, pemerataan wilayah, dan stabilitas politik keamanan menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia.

Meskipun Indonesia tidak dinyatakan langsung sebagai negara yang terklaim kawasannya oleh Tiongkok, namun sebagai negara yang cukup kuat di ASEAN serta memagang komposisi penting dalam menjaga kestabilan kawasan maka mau tidak mau Indonesia harus masuk dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam perkembangannya ada beberapa usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya ikut mengambil andil dalam masalah tersebut antara lain yang pertama adalah jalan diplomasi. Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan sudah dimulai sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 Indonesia telah memprakarsai diadakannya lokakarya membahas Laut China Selatan yang bertajuk *Workshop   for   Managing   Potential   Conflict   in   the   South China Sea*dan diselenggarakan  di Bali. Runtutan lokakarya inilah yang akhirnya membuka jalan untuk mengesahkan *Declaration on the  Conduct in the South China Sea*tahun 2002. Lokakarya-lokakarya tersebut diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Surakarta, Jakarta dan yang terakhir berlangsung di Bandung pada tanggal 22-24  November  2012.  Lokakarya  ini bertujuan  untuk mempertemukan  negara-negara pengklaim dalam suatu forum guna menemukan solusi penyelesaian sengketa di  kawasan  ini  yang  dapat  diterima  semua  pihak dan  membangun  *Confidence Buliding Measure*(CBM) antar semua negara yang memiliki kepentingan di kawasan perairan tersebut.[[30]](#footnote-31) Yang kedua adalah jalan militer. Indonesia berupaya membangun kekuatan laut dengan jalan penguatan armada pertahanan di laut. Salah satu program yang kontroversial adalah dengan membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna, banyak media yang menerangkan bahwa pembangunan tersebut adalah salah satu bentuk tindakan nyata Indonesia menanggapi klaim sepihak dari Tiongkok terhadap Laut China Selatan.[[31]](#footnote-32) Jika diamati lebih jauh tindakan tersebut adalah bentuk *gunboat diplomacy* dimana pengadaan kekuatan militer dalam upaya memperkuat posisi tawar suatu kengininan politis. Dengan adanya kerjasama penguatan secara diplomasi dan militer dan tidak adanya sikap nyata Indonesia terhadap konflik Laut China selatan (dalam artian menentukan keberpihakan yang nyata) maka sudut pandang negara yang berkonflik dalam mengamati situasi dan sikap Indonesia tersebut akan berpotensi berbeda pula dengan kenyataan yang diharapkan. Lebih jauh apakah tindakan tersebut murni menguntungkan Indonesia secara nasional maupun hubungan dalam skala internasional.[[32]](#footnote-33)

Secara formal, Indonesia menyatakan diri bukan sebagai negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan. Akan tetapi, banyak analis yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya juga dianggap sebagai negara pengklaim. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) Indonesia di Perairan Natuna juga termasuk dalam wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Dengan demikian, ada tumpang tindih wilayah antara Tiongkok dengan Indonesia. Jika dilihat kembali berdasarkan perspektif hukum internasional, pendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara pengklaim tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan klaim Tiongkok dengan sembilan garis putus-putusnya tidak berdasarkan pada hukum internasional yang sah, tetapi hanya berupa klaim sejarah. Padahal dalam hukum internasional seperti UNCLOS, laut teritorial dan ZEE dihitung dari garis pangkal daratan. Jika daratan terdekat adalah pulau-pulau di Spratly, maka baik laut teritorial maupun ZEE negara pengklaim tidak akan bersinggungan dengan laut teritorial dan ZEE Indonesia.[[33]](#footnote-34) Dengan posisi seperti ini, Indonesia membuka peluang dirinya untuk dapat berperan menjadi pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Peluang ini tidak akan diperoleh jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara pengklaim, yang berarti juga menjadi aktor langsung dalam sengketa tersebut.

Meskipun Indonesia bukan Negara pengklaim di wilayah Laut Cina Selatan tersebut, akan tetapi Indonesia juga memiliki kepentingan di perairan tersebut. Selain kepentingan politik yang terkait dengan stabilitas kawasan, Indonesia mempunyai pula kepentingan ekonomi di Laut Cina Selatan. Untuk kepentingan pertama, stabilitas kawasan di Laut Cina Selatan akan berimplikasi langsung terhadap Indonesia. Meskipun bukan sebagai Negara pengklaim, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan akan berimplikasi langsung terhadap wilayah kedaulatan di Laut Natuna dan Sekitarnya.

Kepentingan kedua bagi Indonesia adalah kepentingan terkait dengan stabilitas ekonomi kawasan. Dengan terganggu nya laut teritorial Indonesia dan mengganggu proses perkembangan ekonomi Indonesia sedangkan Menurut Pendapat Dari Robert B. Ekelund dan Robert D. Tollison Ilmu Ekonomi itu merupakan kajian dari studi ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai bagaimana cara setiap manusia serta masyarakat yang selalu memiliki keinginan yang tidak pernah terbatas di dalam memilih bagaimana cara mereka untuk mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas demi memuaskan setiap dari keinginan mereka.[[34]](#footnote-35) Laut Cina Selatan sebagai salah satu sumber pendapatan Indonesia, baik dari cabang minyak dan gas maupun perikanan. Wilayah ZEE Indonesia yang termasuk dalam wilayah Laut China Selatan.Berdasarkan peta “U” atau dikenal dengan *Nine Dash Line* yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina 1993, permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada ZEE Indonesia. Faktor inilah yang mendorong Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan solusi sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.[[35]](#footnote-36)

Konflik yang terjadi, dapat menyebabkan naiknya harga minyak mentah dunia yang berpengaruh terhadap APBN Indonesia. Perubahan APBN dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan anggaran di tiap kementrian.[[36]](#footnote-37) Perairan Indonesia di dekat Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Pecahnya perang di kawasan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Selain itu, potensi pariwisata bahari Indonesia juga terganggu jika terjadi perang di Laut Cina Selatan. Kemudian dari sisi ancaman sosial budaya, pecahnya perang di Laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, sudah sepatutnya Indonesia mengambil peran dalam proses penyelesaiannya.

Pergeseran perkembangan ekonomi dunia ke arah timur ini menciptakan peluang yang baik dan momentum yang tepat, yangdapat membawa manfaat bagi bangsa Indonesia, hanya jika Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah) dapat memposisikan dirinya secara strategis dan tepat sebagai pemain utama dan stabilisator kawasan. Hal tersebut dapat dicapai tentunya tanpa mengorbankankepentingan nasional dan didukung dengan kebijakan yang tepat baik di dalam maupun diluar negeri.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji,mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsika kepada judul : **PENGARUH DINAMIKA KONFLIK LAUT CINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan konflik di Laut Cina Selatan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?
2. Sejauh mana strategi pembangunan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan?
3. Bagaimana prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia?

**1. Pembatasan Masalah**

Mengingat belum terselesaikan nya konflik Laut Cina Selatan maka penulis hanya memfokuskan kepada impelementasi prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia periodesasi, pada tahun 2004-2017.

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:**“ Bagaimana implementasi prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi perkembangan konflik di Laut Cina Selatan?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodologis. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta mengembangkan bidang yang diteliti. Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan konflik di Laut Cina Selatan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?
2. Untuk mengetahui sejauh mana strategi pembangunan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan?
3. Untuk mengetahui bagaimana prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia?

**2. Kegunaan Penelitian**

**2.1 Kegunaan Teoritis**

Berguna untuk menambah pengetahuan mengenai konflik Internasional tentang klaim di Laut Cina Selatan dan implikasinya dengan bagaimana prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia.

**2.2 Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, kegunaan penelitiaan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasiona. Penulis juga berharap penelitian dapat menjadi referensi bagi para penstudi lainnya, khususnya pemerhati studi hubungan internasional untuk mengetahui permasalahan tentang Bagaimana implementasi prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi perkembangan konflik di Laut Cina Selatan.

1. **Kerangka Teori dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teori**

Dalam dunia Hubungan Internasional terdapat banyak sekali teori dan perspektif yang turut memperkaya dan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang ada dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Perspektif dan teori dalam Hubungan Internasional pada awalnya hanya terdapat dua teori klasik, yakni Realisme dan Liberalisme. Lalu, perspektif tersebut berkembang menjadi teori-teori alternatif, seperti Rasionalime, teori kritis dan lain sebagainya.

Studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan, salah satunya adalah pandangan neorealisme. Pada neorealisme oleh Kenneth Waltz ia mengambil beberapa elemen realisme klasik dan neoklasik sebagai titik awal, pendekatan eksplanatorinya sangat dipengaruhi oleh model ekonomi. struktur sistem yang bersifat eksternal atau aktor, terutama dalam distribusi kekuasaan relatif, adalah fokus analitis sentral.[[37]](#footnote-38) Seperti yang telah dikemukakan oleh Kenneth waltz konsep strukturalisasi realisme bahwa :

**“Negara-negara adalah pencari kekuasaan dan ‘sadar keamanan’ bukan disebabkan oleh sifat manusia, tetapi lebih disebabkan karena strukstur sistem internasional mendorong mereka melakukan demikian, kaum neorealis tidak menyangkal semua kemungkinan bagi kerjasama antar negara. Akan tetapi, mereka tetap berpendapat bahwa negara-negara yang bekerja sama akan selalu berusaha memaksimalkan kekuatan relatif dan mempertahankan otonominya.”[[38]](#footnote-39)**

Seperti Tiongkok yang lebih mengutamakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang terlibat klaim di Laut Cina Selatan karena Tiongkok akan selalu memaksimalkan kekuatan relatif nya agar kepentingan nasional nya tercapai, dan meminimalisir campur tangan orang ketiga baik itu state maupun non state.

Dengan rasa ‘sadar keamanan’ seperti yang dikatakan Kenneth Waltz di atas, Tiongkok memicu Sengketa terirorial ini dengan pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spartly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.[[39]](#footnote-40) Dalam bukunya yang berjudul *The Twenty Years Crisis*(1939), E.H. Carr bercerita tentang konflik antar negara bahwa:

**“Konflik antar Negara tidak bisa dihindarkan dalam sistem internasional tanpa otoritas yang berwenang yang mengatur hubungan di antara mereka. Setiap individu harus tunduk pada ketentuan hukum dalam negara. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Negara. Karena dalam sistem internasional tidak ada sistem peraturan yang dapat memaksakan ketundukan Negara. Tidak ada hukum internasional yang bisa membuat Negara mempertimbangkan tindakan-tindakannya. Negara dapat dengan bebas melakukan apa saja dengan kekuatan yang mereka miliki.”[[40]](#footnote-41)**

Untuk mengkaji politik internasional tidaklah cukup apabila hanya berupa harapan atau cita-cita. Carr meyakini bahwa realisme adalah koreksi yang diperlukan terhadap maraknya utopianisme yang selalu berupaya untuk menghapuskan bencana perang. Yang diperlukan adalah pendekatan yang tepat yang lebih menekankan realitas kekuasaaan politik internasional daripada yang hanya sekedar harapan akan bagaimana dunia seharusnya. Dengan kata lain pemikiran akan *kenyataan* daripada *yang seharusnya* jauh lebih masuk akal dalam politik internasional.[[41]](#footnote-42)

Seperti yang telah dikemukakan carr, tidak ada hukum internasional yang bisa membuat negara mempertimbangkan tindakan-tindakannya. Hal itu lah yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap konflik LCS ini, Tiongkok tidak memperdulikan mahkamah Internasional, dikarenakan klaim nya yang berdasarkan historis bukan berdasarkan hukum.

Sedangkan konflik sendiri telah di jelaskan oleh Robert M.Z Lawang dalam bukunya *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi* bahwa :

**“konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.”[[42]](#footnote-43)**

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto pada poin *kelima* pada bagian bentuk konflik sosial,Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.[[43]](#footnote-44)

Seperti yang telah dikemukakan konsep di atas, negara-negara lain seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia yang ikut terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan di karenakan klaim Tiongkok yang mempengaruhi sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, dan kedaulatan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa konflik merupakan benturan kekuatan dengan kepentingan, Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[44]](#footnote-45) Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

**“Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif *(comparative advantage)* tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional”.[[45]](#footnote-46)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari domografi, karakter, budaya, bahkan history yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

**“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.”[[46]](#footnote-47)**

 Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Kepentingan Nasional Indonesia seperti yang di jelaskan di atas, untuk mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan untuk melindungi kedaulatan negara.

Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting. Kebijakan *(policy)* itu sendiri menurut P.A Reynolds mengandung pengertian sebagai berikut:

 **“Sesuatu yang diungkapkan secara berhati-hati untuk menyatakan maksud dari suatu aksi yang dilakukan untuk kebijakan *(policy)* sering juga ditujukan bukan hanya untuik menyatakan aksi, akan tetapi juga untuk menyatakan prinsip atau dasar-dasar yang mempengaruhi dilakukannya suatu aksi untuk mencapai tujuan tertentu”[[47]](#footnote-48)**

 Kebijakan suatu negara baik yang bersifat kedalam atau keluar dibuat untuk mencapai suatu tujuan nasional. Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia pada era pemerintahan SBY yaitu MP3EI sedangkan pada era pemerintahan Joko Widodo adalah Trisakti Nawacita yang sama-sama mengedepankan pembangunan Infrastruktur, Pemerataan wilayah dan menjadikan Indonesia menjadi negara maritim. Sedangkan untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus berusaha hingga mecapai target. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut Sudono Sukirno adalah :

**“Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia.”[[48]](#footnote-49)**

Seperti yang dikatakan di atas bahwa pembangunan ekonomi pula diukur dari perkembangan teknologi dan peningkatan infrastruktur oleh karena itu presiden SBY dan Joko Widodo sama-sama memprioritaskan meningkatkan insfrastruktur , pemerataan wilayah serta peningkatan kualitas maritim nya agar tercapainya kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pembangunan ekonomi di Indonesia berkonsep:

**“Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang menganut prinsip kemestaan, artinya pembangunan bersifat komperhensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, pada masa orde baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang yang dimulai sejak 1 april 1969, program pembangunan jangka panjang ini dibagi-bagi menjadi tahapan-tahapan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Jika tidak terjadi perubahan sistem pemerintahan, saat ini Indonesia berada dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua, dalam kurun waktu 1994-2019.”[[49]](#footnote-50)**

Berdasarkan paparan konseptual di atas, maka penulis mencoba membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan kepada hipotesis, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa asumsi antara lain:

1. klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Spartly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992, pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spartly, Paracels dan Pratas. Republik Rakyat Tiongkok ingin menguasai keseluruhan wilayah Laut Cina selatan dengan berdasarkan klaim historis.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia turut pula termasuk ke dalam wilayah klaim RRT atas kepemilikan LCS, yang akan mengganggu arus ekspor dan impor Indonesia melalui jalur Laut dan stabilitas ekonomi Indonesia.
3. Dengan adanya gangguan oleh konflik LCS maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, seperti memprioritaskan pengembangan infratstuktur, stabilitas politik keamanan dan pemerataan wilayah.
4. **Hipotesis**

Hipotesis dalam sebuah penelitian diperlukan karena hal ini bisa memberikan batasan-batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan sebagai alat yang sederhana untuk memfokuskan data yang tercerai berai tanpa arahan yang jelas. Berdasarkan dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran sebelumnya yang penulis kemukakan, maka penulis menarik satu hipotesis yaitu sebuah kesimpulan sementara tentang hubungan antara beberapa variabel mengenai permasalah yang perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang penulis ambil dari permasalahan ini adalah sebagai berikut :

 **“Jika pemecahan penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan dilakukan melalui mediasi dan fasilitasi secara kelembagaan dalam organisasi dan hukum Internasional, maka pengembangan infrastruktur dan stabilitas politik keamanan menjadi prioritas strategi kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka penulis membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam (Teoritik)** | **Indikator** **(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas : Jika perkembangan konflik di Laut China Selatan sudah melalui jalur diplomasi | 1. Adanya upaya penyelesaian konflik melalui mediasi.
2. Adanya upaya penyelesaian konflik melalui fasilitasi badan hukum.
 | 1. Data-data dan fakta mengenai peran ASEAN sebagai mediasi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 19 Juli 2011 telah menyepakati kerangka acuan penyusunan *code of conduct* di Laut Cina Selatan. (sumber : Ali Helvas Alman, *“Dinamika Kontemporer Sengketa Laut China Selatan”,* July 2011.)
2. Data-data dan fakta mengenai Keputusan Mahkamah Arbitrase atas Kepemilikan Laut Cina Selatan pada 12 Juli 2016 (Sumber: <https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan> oleh Koesmawardhani Widhi Nograhany**, “*Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan”,*** di akses pada tanggal 19 Apr. 17 pada pukul 15.10 WIB)
 |
| Variabel Terikat:1. Pembangunan Ekonomi di Indonesia
 | 1. Adanya pembangunan ekonomi strategi prioritas di bidang Infrastruktur
2. Adanya kebijakan pembangunan stabilitas politik keamanan.
 | 1. Data dan fakta mengenai kebijakan pembangunan ekonomi di bidang infrastruktur di masa pemerintahan SBY yaitu (sumber : “*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025”*.)
2. Data dan fakta mengenai Adanya kebijakan pembangunan stabilitas politik keamanan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu

(sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, RINGKASAN EKSEKUTIF *“Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”* , Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014). |

**4. Skema Kerangka Pemikiran**

**Konflik Laut Cina Selatan, negara yang terlibat: RRT, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam**

**Indonesia turut menengahi konflik tersebut, serta ter klaim nya wilayah ZEE yang merugikan kestabilan perekonomian di Indonesia.**

**Mendorong terciptanya kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk peningkatan pembangunan infrastuktur, stabilitas politik keamanan, dan pemerataan pembangunan ekonomi.**

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa keejadian dan masalah berdasarkan realita. Data diorganisasikan secara sistemats untuk menggambarkan fakta-fakta atau bidang tertentu secara akurat dan cermat. Dalam pelaksanaanya metode ini tidak sebatas pengumpulan data saja, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.
2. Metode Historis Analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet, buku-buku.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Kampus I, Jln. Lengkong Besar No 68.
2. **Lamanya penelitian**

Lama penelitian yang dibutuhkan penulis sekitar 6 bulan dari bulan Januari hingga Juni 2017.

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang meliputi pembatasan dan perumusan masalah , tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang gambaran umum, dinamika konflik Laut cina selatan, dan proses penyelesaian konflik mengenai bagaimana dinamika akar konflik di Laut Cina Selatan sebagai variabel bebas dari penelitian ini.

BAB III Membahas tentang tinjauan umum pembangunan ekonomi di Indonesia seperti situasi dan kondisi sosial geopolitik pembangunan di Indonesia, *Masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan ekonomi di Indonesia masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan ekonomi di Indonesia masa pemerintahan presiden Joko Widodo. dan bagaimana prioritas strategi kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, sebagai variabel terikat.

BAB IV Membahas Analisis: Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. tentang prioritas strategi pembangunan ekonomi Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut cina selatan.

BAB V Kesimpulan: Meliputi kesimpulan hipotesis dan saran dari hasil.

1. [www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html](http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html) , diakses pada tanggal 16 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Dong Manh Ngunyen, “*Settlement of Dispute Under The 1982 United Nations Convention Of The Law Of The Sea:The Case South China Sea Dispute”, University of Queensland Law Journal,* Vol 25 No.1 (Queensland 2006), Hlm 86  [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Simela Victor Muhammad *“Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan : Info Singkat Hubungan Internasional”* (Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012) Hal. 6. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Evelyn Goh, (Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, 2005), East-West Center Washington, Hal. 31. [↑](#footnote-ref-9)
9. Huala Adolf.Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.Jakarta:Sinar Grafika.hlm:2  [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
11. Evelyn Goh*,* Op.cit Hlm 6. [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://www.eastasiaforum.org/2011/06/29/china-s-militant-tactics-in-the-south-chinasea/>, *“China Militant Tactics in The South China Sea”* diakses tanggal 16 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-13)
13. Evelyn Goh, Op.Cit., hal. 19 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Suharna, Karmin Kolonel ,SIP.,*MA “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi Ketahanan Nasional: Majalah Komunikasi dan Informasi edisi 94 tahun , 2012 “,* Hal. 34. [↑](#footnote-ref-16)
16. . [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\_khusus/2011/07/110719\_spratlyconfl ict/](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconfl%20ict/) *“Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,”* BBC online, 21 Juli 2011, diakses pada 20 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-17)
17. Setyasih Harini *“Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta”,* 2015, Hal. 4. [↑](#footnote-ref-18)
18. Leszek Buszynski*,. “The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry. The Washington Quaterly, Spring, 35: 2”.* 2012, hal. 139-156. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ali Helvas Alman*, “Dinamika Kontemporer Sengketa Laut China Selatan”,* July 2011 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. Roza rizki, Nainggolan Partogi Poltak,Muhammad Victor Simela, *“Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan”*, 2013, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Kartasasmita, Gianjar dan Siagian, 1994*, “pembangunan infrastruktur seminar pebangunan Konsep dan implikasi.”* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogjakarta: Universitas Gadjah Mada Hlm 45 [↑](#footnote-ref-26)
26. Loc.cit*.*Ali Helvas Alman [↑](#footnote-ref-27)
27. <http://presidenri.go.id/internasional/liputan-media-lokal-jepang-dan-cina-tentang-kunjungan-kenegaraan-presiden-jokowi.html> Kantor Staf Presiden | Kementerian Sekretariat Negara RI | Sekretariat Kabinet RI PresidenRI.go.id © 2015 . di akses pada tanggal 20 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025” ,* hlm 33 [↑](#footnote-ref-29)
29. Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019”*. Hlm 5 [↑](#footnote-ref-30)
30. Letjen TNI Moeldoko (2012) *“Memperkuat Bargaining Power Indonesia Guna Menjaga Keamanan Kawasan ASEAN”.*Esai disampaikan dalam acara Focus Group Discussion Komite Ekonomi Nasional : Kajian Geopolitik sebagai Aset Nasionalpada tanggal 21 Maret 2012 di Jakarta. [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004161227-20-82688/manuver-tni-bentengi-natuna-di-tepi-laut-sengketa/> *“Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa”*Senin, 05/10/2015 09:10 WIB di akses pada tanggal 20 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-33)
33. Oegroseno, Arif Havas, *“Indonesia, South China Sea and the 9-dashed lines”,* The Jakarta Post, 9 April 2014. [↑](#footnote-ref-34)
34. Baysinger, Barry, Robert B Ekelund Jr., and Robert D Tollison. 1980. *“Mercantilism as a Rent-Seeking Society”*. Dalam Buchanan, Tollison & Tullock (eds.), *Toward a Theory of Rent Seeking Society: 235-268. College Station: Texas A & M University Press.* [↑](#footnote-ref-35)
35. Zainia, Nurul Fitri*.,” Diplomasi Laut Cina Selatan”,* E-Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman 2013 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.* Hlm 136 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.*Hlm 83 [↑](#footnote-ref-39)
39. Simela Victor Muhammad (Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan : Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012) Hal. 6. [↑](#footnote-ref-40)
40. Scott Burchill-Andrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Iinternasional.*Bandung, Nusa Media. Hal 97-98 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.* Hlm 92 [↑](#footnote-ref-42)
42. Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:universitas terbuka 1994).hal.53 [↑](#footnote-ref-43)
43. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.86. [↑](#footnote-ref-44)
44. P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163 [↑](#footnote-ref-45)
45. Herrick, Bruce/Charles P Kindleberger. 1988; *Ekonomi Pembangunan, terjemahan* Drs. Komarudin, Bina Aksara Jakarta. Hlm 21 [↑](#footnote-ref-46)
46. Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe. 1990 *Pengantar Hubungan internasional: Keadilan dan power*, Bandung: CV Abardin. Hlm 165 [↑](#footnote-ref-47)
47. P.A Reynolds, *An introduction to Internal Relations 3rd Edition* (Longman Group UK Limited, 1994), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-48)
48. Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan).* Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. Hlm 20 [↑](#footnote-ref-49)
49. Dahlan, Dadang Drs,Mpd *“Memahami Makna Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang: Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru”* Hlm 9 [↑](#footnote-ref-50)